KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Daerah, utamakan infrastruktur dong
Tanggal : Rabu, 10 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Jokowi Bantu Lampung Perbaiki Jalan

Daerah, Utamakan Infrastruktur Dong

Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mendesak pembangunan infrastruktur daerah terutama jalan, terus digenjot agar masyarakat tidak kecewa. Kepala daerah mesti lebih memperhatikan kualitas jalan yang menjadi kewajiban daerah dan merupakan hak masyarakat.

RIDWAN menyoroti masalah ini setelah Presiden Jokowi turun langsung meninjau jalan yang rusak dan berlubang yang viral di media sosial, di Provinsi Lampung. Jokowi bahkan menyindir situasi jalan yang banyak berlubang dan rusak, sehingga membuatnya tertidur dalam mobil dinas ditumpanginya.

Ridwan berharap, turunnya Presiden memantau situasi jalan di daerah itu membuat kepala daerah lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur jalannya. Kepala daerah sering kali tidak memperhatikan jalan di di daerahnya dengan dalih kekurangan anggaran.

"Saya sebenarnya prihatin terhadap para gubernur, bupati dan wali kota yang tidak memperhatikan soal tanggung jawabnya terhadap jalan. Jangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan alasan, tameng, bahwa tidak cukup (APBD untuk memperbaiki jalan)," ujarnya.

Ridwan heran Pemerintah Daerah justru lebih memilih menghabiskan anggarannya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting.

"Seperti Sulawesi Tenggara ini lebih mengutamakan membangun gedung kantor gubernur dibanding jalan provinsi yang sudah sangat rusak," katanya.

Dia menambahkan, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menginstruksikan para kader Golkar di DPR, termasuk dirinya untuk lebih memperhatikan infrastruktur di seluruh Indonesia yang bermasalah. Instruksi diberikan jauh sebelum Presiden turun ke Lampung.

"Pak Airlangga Hartarto sudah memerintahkan kepada kami anggota Komisi V (dari Fraksi) Golkar untuk memperjuangkan agar jalan daerah dapat dibiayai oleh anggaran pendapatan negara," pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin berharap kebijakan Pemerintah Pusat mengambil alih sebagian pembangunan ruas jalan di Lampung dimaknai agar kepala daerah lebih peduli pembangunan di daerahnya.

Bukan sebaliknya, malah bertepuk tangan, gembira tanggung jawabnya diambil alih Pemerintah pusat.

"Tepuk tangan Gubernur Lampung ini jangan sampai bermakna kegembiraan karena lepas tanggung jawab," katanya.

Dia pun meminta Gubernur Lampung dan jajaran dapat lebih bersemangat lagi melakukan perbaikan ke depan. Untuk itu, dia mewanti-wanti agar segenap jajaran Pemda lebih peduli dan sungguh-sungguh untuk perbaikan infrastruktur setempat, khususnya jalan.

"Jangan lupa, di balik ucapan Jokowi ini, ada pesan yang menusuk bagi Pemerintah Provinsi Lampung lantaran dianggap tidak cukup mampu menyelesaikan infrastruktur yang satu ini," ujarnya. ■ KAL

Speaker Quote

"Saya sebenarnya prihatin terhadap para gubernur, bupati dan wali kota yang tidak memperhatikan soal tanggung jawabnya terhadap jalan. Jangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan alasan, tameng, bahwa tidak cukup (APBD untuk memperbaiki jalan)."